

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH KABUPATEN TULUNGAGUNG BERBASIS E-GOVERNMENT

Andra Bisma Kusuma¹, Pujiati², Jenius Cahya Ravenda³, Anang Sugeng Cahyono⁴,
Nunun Nurhajati⁵

Universitas Tulungagung^{1,2,3}

1bismaandra6@gmail.com, 2pujiatisakira@gmail.com, 3cahyaravenda@gmail.com

4akusukambahdi@gmail.com, 5nununnurhayati@gmail.com

Received: 21-12-2024

Revised: 22-02-2025

Approved: 10-03-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan website <https://dinkopum.tulungagung.go.id> oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara nyata dan mendalam. Data dikumpulkan melalui teknik kualitatif dengan melibatkan beberapa narasumber. Analisis dilakukan berdasarkan model e-government Fietkiewicz et al., yang mencakup lima aspek utama: Information Dissemination, Communication, Transaction, Integration, dan Participation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi website telah memberikan kontribusi dalam penyebaran informasi dan komunikasi dengan pelaku UMKM, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam kelengkapan informasi layanan. Aspek transaksi telah berjalan melalui pendataan dan transfer informasi ke pemerintah pusat, sementara integrasi dengan berbagai instansi sudah cukup baik dalam mendukung layanan UMKM. Namun, partisipasi publik masih belum optimal karena belum adanya forum diskusi atau mekanisme e-voting. Secara keseluruhan, pemanfaatan website ini memiliki potensi besar dalam mendukung pengelolaan UMKM, tetapi masih memerlukan peningkatan, terutama dalam inovasi layanan informasi dan keterlibatan publik.

Kata Kunci: E-Government, UMKM, Dinas Koperasi, Tulungagung, Pengelolaan UMKM

PENDAHULUAN

Perubahan teknologi menjadikan masyarakat mengalami peralihan gaya hidup dalam melakukan aktivitas sehari-harinya (Miftitah & Mashudi, 2023). Adapun salah satu usaha yang memiliki peluang di era digital yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah, imbas perkembangan teknologi memudahkan pelaku usaha dalam memasarkan produk hingga memperluas pangsa pasar. Tak hanya itu, dengan adanya perkembangan teknologi mendorong dan merubah pola pikir masyarakat terutama bagi pelaku usaha untuk menciptakan berbagai inovasi produk (Cahyono, 2016). Konsep pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah khususnya dalam memberikan pelayanan publik sering di istilahkan dengan *e-Government*. *E-Government* mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas Dinas Koperasi dalam pengelolaan UMKM di Kabupaten Tulungagung, hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.

Petunjuk tersebut menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Menurut Akbar & Sensuse dalam penelitian (Cahyono et al., 2022) *Electronic Government (e-Gov)* merupakan proses sistem pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memfasilitasi komunikasi dan transaksi antara pemerintah, masyarakat, organisasi bisnis, serta antara instansi pemerintah dan jajarannya. Dengan demikian, tujuan penerapan *e-Gov* adalah untuk mencapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah

terhadap masyarakat. Fietkiewicz, Mainka, dan Stock mengembangkan model *e-Government* yang terdiri dari lima pilar yang masing-masing pilar memiliki indikator sebagai berikut: penyebaran informasi (katalog), komunikasi, transaksi, interoperabilitas (integrasi), dan partisipasi. Dalam model ini setiap tahapan tidak harus dilalui secara berurutan, karena menurut mereka tidak ada hierarki yang mengatur urutan antar “tahapan” atau tingkatan tersebut. (Irawan & Hidayat, 2021).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia no. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pada Pasal 1 yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha milik perseorangan atau badan usaha perseorangan, yang mempunyai kriteria tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan tersebut (Al Farisi & Fasa, 2022). Pemerintah Kabupaten Tulungagung memiliki peran dan tanggung jawab dalam membantu melakukan pemberdayaan UMKM. Dinkopum mempunyai peranan penting dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendampingan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (Nomor, 2021). Adapun regulasi Daerah Kabupaten Tulungagung melalui persetujuan bersama DPR dan Bupati No 4 Tahun 2013 menimbang bahwa untuk meningkatkan peran dalam upaya merealisasikan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat dan perekonomian maka perlu dilakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (Minarni & Rahmawati, 2018).

Hadirnya *e-Government* melalui layanan *website* merupakan hal baru yang dapat menjawab berbagai persoalan pelayanan UMKM sebelumnya. Kondisi dimana masyarakat harus datang secara langsung untuk memperoleh informasi ke Dinkopum Kabupaten Tulungagung sering menemukan berbagai kendala seperti inefisiensi waktu, tenaga dan biaya bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait layanan UMKM. Didasarkan kondisi tersebut Dinkopum Kabupaten Tulungagung melakukan upaya pemberdayaan dan perlindungan UMKM di Kabupaten Tulungagung telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi berbasis *e-government (e-gov)* yakni *website* Dinas Koperasi dan UMKM (<https://dinkopum.tulungagung.go.id>) . *Website* yaitu berupa *platform online* yang saling terkait dan dapat di akses menggunakan *internet* (Paryanta et al., 2017). *Situs web* adalah kumpulan halaman yang menampilkan konten seperti teks, gambar diam atau bergerak, animasi, suara, dan kombinasi dari semua ini baik statis maupun dinamis (Arifin & Handayanto, 2019). Transparansi informasi publik sangat penting karena dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh berita yang akurat, informasi merupakan data yang telah diolah sehingga dapat mengoptimalkan pemahaman juga memecahkan masalah (Jogiyanto, 2017). Dengan keberadaan *website* <https://dinkopum.tulungagung.go.id> masyarakat menjadi paham akan aktifitas dan profil dari Dinas Koperasi dan UMKM. Aksesibilitas *website* memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi tanpa harus datang langsung ke dinas dan tentunya sangat membantu masyarakat dalam mengefisienkan waktu serta tenaga. Masyarakat dapat menghubungi langsung melalui email atau berkirim pesan secara langsung pada fitur *website* yang telah tersedia. Pada praktiknya masih terdapat kendala pada layanan *website* tersebut seperti minimnya fitur layanan dan akses aplikasi terkadang mengalami gangguan teknis.

Berdasarkan deskripsi dinamika pelayanan terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Tulungagung, maka penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam terkait upaya pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung melalui Dinkopum dalam pengelolaan

UMKM berbasis *e-government*. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif solusi terkait kendala maupun hambatan yang dihadapi serta manfaat yang diperoleh guna pengembangan UMKM di Kabupaten Tulungagung.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang mengolah data deskriptif dalam bentuk tertulis ataupun lisan tentang seseorang atau tindakan yang bisa di amati dan di ceritakan (Nuryana et al., 2019). Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian yang berusaha untuk menggambarkan informasi atau situasi objek penelitian, menganalisis serta membandingkannya berdasarkan kenyataan saat ini, juga mencoba mencari solusi pada masalah yang terjadi. Secara umum pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan kejadian secara nyata, realistik, dan juga kekinian (Pilendia, 2020). Fokus pada penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penerapan *website* <https://dinkopum.tulungagung.go.id> oleh Dinkopum Kabupaten Tulungagung terhadap pengelolaan UMKM.

Menggunakan data primer dan sekunder secara teknis pengumpulan data melalui kualitatif dengan melibatkan beberapa narasumber. Adapun alasan menggunakan metode kualitatif karena lebih sensitif dan secara langsung mewakili hubungan peneliti dan responden. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami seberapa efektifnya Dinkopum dalam pengelolaan UMKM. Penelitian ini di laksanakan di Kabupaten Tulungagung pada Dinkopum Kabupaten Tulungagung Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No 32 Kabupaten Tulungagung. Alasan pemilihan lokasi dikarenakan jumlah UMKM di Kabupaten Tulungagung semakin bertambah banyak, disisi lain pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku maupun calon pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, pemanfaatan *website* <https://dinkopum.tulungagung.go.id> Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung diukur keberhasilannya dalam pengelolaan pelakuUMKM menggunakan pendekatan model *e-government* Fietkiewicz et.al terdiri dari 5 (lima) aspek sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Information Dissemination

Information Dissemination adalah suatu penyebaran informasi yang menunjukkan bagaimana penyajian yang di hadirkan pada portal *e-government* dapat diakses oleh pengguna layanan (Aromatica & Putera, 2023). Informasi merupakan aspek penting dimana konten yang di publikasikan dapat di akses dan berguna bagi masyarakat luas. Pada laman *website* <https://www.dinkopum.tulungagung.go.id> terdapat ketersediaan informasi layanan publik, namun informasi yang disediakan masih sebatas profil dari dinas, dasar hukum, berita, dokumentasi, serta daftar para UMKM dan Koperasi yang terdata.

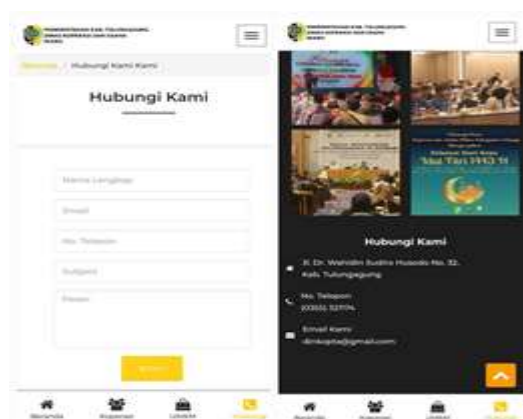


Gambar 1. Tampilan awal dari website (<https://dinkopum.tulungagung.go.id>)

Dapat ditarik kesimpulan aspek informasi masih belum berjalan dengan baik, dimana dalam website <https://www.dinkopum.tulungagung.go.id> hanya mencantumkan seputar daftar para UMKM dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Tulungagung serta beberapa daftar layanan yang disediakan.

Communication

Komunikasi merupakan sebuah aspek penting untuk menentukan keberhasilan dalam suatu kebijakan. Konsentrasi pada pilar ini adalah pertukaran informasi oleh pihak berwenang dan masyarakat dalam melakukan interaksi serta didukung tersedianya media sosial dan *web 2.0* (Pratama et al., 2020). Didalam website terdapat layanan komunikasi yang dapat di lihat melalui *button bar* "hubungi kami" untuk menjembatani proses komunikasi bagi kedua belah pihak tanpa bertemu secara langsung. Pada laman *page* juga mencantumkan media sosial yang dapat di gunakan untuk proses komunikasi, diantaranya *instagram*, *contact person*, dan e-mail dinkopta@gmail.com yang dapat dihubungi untuk melakukan komunikasi dua arah. Dapat di simpulkan aspek komunikasi sudah berjalan cukup baik, dimana pemerintah dalam melakukan proses terjadinya interaksi komunikasi dengan para pelaku usaha sudah adanya media untuk mewedahi.



Gambar 2 (<https://dinkopum.tulungagung.go.id>)

Transaction

Fietkiewicz et.al menyatakan bahwa memasukkan proses transaksi ke dalam situs *web* pemerintah dapat mengukur suatu keyakinan masyarakat kepada pemerintah dan mengoptimalkan kegunaan situs *web*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang menikmati manfaatnya maka akan makin tinggi juga kesempatan untuk meningkatkan *e-government*. Akan tetapi kebutuhan jaminan keamanan data menggaris bawahi kebutuhan dalam menerapkan konsep transaksional dari tampilan *website* (Nangameka, 2022). Berdasarkan pengamatan pada *website* Dinkopum sudah adanya kemampuan untuk menampilkan data-data yang akan ditransfer ke pemerintahan pusat dalam program Pusat Layanan Kekuatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PL-KUMKM) yang merupakan unit layanan untuk pendataan lengkap KUMKM. Dengan adanya transfer informasi yang sudah di serahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung kepada Kementrian juga akan memberikan manfaat balik kepada pelaku usaha. Manfaat tersebut berupa mudahnya transfer dana bantuan yang diterima dari Kementrian.

Integration

Integration merupakan pilar ke empat yang di kemukakan oleh Fietkiewicz, Mainka, & Stock. Halangan terbesar dari sistem *e-government* adalah informasi dan kompleksitas data misalnya antar pemerintah pusat dan daerah. Integrasi juga menekankan bahwa salah satu kunci dari sebuah keberhasilan *e-government* yaitu seluruh data dapat digunakan secara bersamaan oleh seluruh komponen pemerintahan. Adanya data sharing dalam protokol yang di sepakati bersama beberapa pihak pemerintah tingkatan yang terkait merupakan sebuah kunci dari penerapan integrasi. Pada halaman web Dinkopum Kabupaten Tulungagung adanya integrasi antar unit instansi pemerintah di antaranya :

- 1) Notaris yaitu lembaga atau birokrat umum untuk melaksanakan tugas terkait layanan hukum (Shidiq & Zubaedah, 2022). Dalam hal ini notaris terintegrasi untuk melakukan pengesahan akta pendirian koperasi.
- 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) memiliki tanggungjawab serta fungsinya dalam menjalankan kegiatan pemerintahan daerah (Deva et al., 2022). Dalam pelaksanaan mengurus izin usaha simpan pinjam di Kabupaten Tulungagung harus melengkapi beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga koperasi.
- 3) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan salah satu direktorat jenderal pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana mempunyai peran dan tugas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan fasilitas pengajuan dibidang HAKI, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, melaksanakan evaluasi serta pelaporan, melaksanakan pemeriksaan, sertifikasi, mutasi, dan juga lisensi (Manggara & Kholil, 2019). Dalam hal ini DJKI dan Dinas Koperasi bekerjasama untuk memfasilitasi pengurusan merek dagang.
- 4) PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) bertugas dan berfungsi mengumpulkan informasi, menyimpan dan mendokumentasikan informasi, mengklasifikasikan informasi, menyediakan informasi, memberikan pelayanan informasi. Dimana untuk mempercepat pelayanan permohonan informasi <https://ppid.tulungagung.go.id> menggunakan sistem

tiket. Setiap pemohon akan mendapatkan nomor tiket yang unik dimana dapat di gunakan untuk melacak progres dan respon secara langsung.



Gambar 3. (<https://dinkopum.tulungagung.go.id/>, n.d.)

Dapat disimpulkan pada pilar ini sepenuhnya sudah terpenuhi karena sudah adanya integrasi dengan instansi dalam mewujudkan keberhasilan dari implementasi *e-government*.

Participation

Partisipasi merupakan suatu pengembangan dari sistem *e-government* yang meliputi pemberian *e-voting*, diskusi terbuka serta penglibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintah melalui *e-government*. Adapun variabelnya meliputi tersedianya kuisisioner online, adanya forum untuk mengajukan pertanyaan pada penyedia layanan, saluran untuk melaksanakan pertemuan publik dan voting. Pilar partisipasi merupakan sebuah konsekuensi dari tata kelola pemerintahan yang demokratis, yang mana partisipasi publik atau masyarakat harus dipertimbangkan. Selaras dengan penjelasan Fietkiewicz et al. menunjukkan situs *web* merupakan suatu peluang untuk memobilisasi berbagai aspirasi masyarakat, dimana pengguna difasilitasi keterlibatannya oleh pemerintah yang aksesnya tidak terikat ruang dan waktu. Fleksibilitas masyarakat dalam berpartisipasi pada situs *web* tentunya harus diatur oleh pemerintah untuk mengontrol berbagai topik. Penambahan literasi yang cukup bagi masyarakat agar bijak dalam menyampaikan aspirasi tentunya sangat penting. Akan tetapi pemerintah kabupaten Tulungagung belum maksimal dalam menerapkan pilar partisipasi publik, karena belum adanya forum kuisisioner online dan juga saluran voting secara online yang disediakan bagi para pengguna untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan data dan hasil pembahasan diatas dapat diidentifikasi bahwa praktik penggunaan *website* Dinkopum Kabupaten Tulungagung telah berjalan dengan baik, namun dalam prespektif model *e-gov* Fietkiewicz et.al pada aspek *information*

dissemination masih perlu upaya peningkatan inovasi layanan informasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang di paparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan *website* <https://dinkopum.tulungagung.id> pada Dinkopum Kabupaten Tulungagung menunjukkan potensi yang cukup baik dalam pengelolaan UMKM. Melalui analisis 5 (lima) pilar model Fietkiewicz, Mainka, dan Stock (2017) masih belum terpenuhi secara maksimal dan masih ada beberapa hambatan. Pada pilar *information* masih terdapat kekurangan dalam mendeskripsikan layanan informasi. Kurangnya SDM yang memadai di bidang IT mengakibatkan lemahnya penyampaian informasi kepada para pengguna. Pilar *communication* antara pengguna dan penyedia layanan sudah terjalin dengan baik, dimana terdapat media untuk menjembatani proses komunikasi dua arah. Akan tetapi, fitur yang terdapat pada layanan pengaduan masih belum optimal dimana setiap pengaduan hanya dapat diketahui oleh dua pihak terkait. Selanjutnya pilar *transaction* belum sepenuhnya terpenuhi karena pemerintah dalam memanfaatkan *website* hanya menyajikan daftar para UMKM dan Koperasi. Dimana data tersebut digunakan sebagai alat pendataan yang selanjutnya akan di transfer ke pemerintah pusat untuk diproses oleh Kementerian. Pilar *integration* telah tercapai dengan baik, terlihat dari kerjasama antara Notaris, DPMPTSP, DJKI, dan PPID dalam pengelolaan dokumen. Namun aspek *participacion* masih belum optimal dalam pelaksanaannya, terutama belum adanya forum kuesioner online untuk masyarakat di dalam *website*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, S., & Fasa, M. I. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84.
- Arifin, Z., & Handayanto, A. (2019). Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Website Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. *Seminar Nasional Science and Engineering National Seminar*, 1(1).
- Aromatica, D., & Putera, R. E. (2023). Evaluasi Program E-Kelurahan Di Kota Padang Menggunakan E-Government Maturity Model. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Jisip)*, 12(2), 185–196.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140–157.
- Cahyono, A. S., Zauhar, S., & Domai, T. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Pengadilan Agama Kelas IA Tulungagung. *Publiciana*, 15(02), 82–97.
- Deva, I. G. A. N. A., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Implementasi Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pasca Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2018 (Studi kasus di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar). *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 132–137. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4672.132-137>
- Irawan, B., & Hidayat, M. N. (2021). E-government: konsep, esensi dan studi kasus. Universitas Mulawarman Repository “REPO-MAN.
- Jogiyanto, H. M. (2017). *Konsep Dasar Sistem dan Informasi*.
- Manggara, R. K., & Kholil, M. (2019). Studi Perlindungan Hukum Merek Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Jenang Di Kabupaten Ponorogo Dalam Upaya Mendukung Berkembangnya Ekonomi Kreatif. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 18–24.
- Miftitah, F. A. N., & Mashudi, M. (2023). Peluang Bisnis Bagi Umkm Di Era Digital (Studi Kasus Pada Umkm Sheo Sweet Di Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung). *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(1), 358–365.
- Minarni, E., & Rahmawati, D. (2018). Pemberdayaan UMKM Berdasarkan Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. *BENEFIT*, 5(1), 13–30.

- Nangameka, T. I. (2022). Evaluating E-Government Maturity Using the Pillar Approach: A Focus on Situbondo Regency Government Official Website, Indonesia. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 39–56.
- Nomor, P. P. R. I. (2021). Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.
- Nurhadryani, Y. (2015). Memahami Konsep E-governance Serta Hubungannya dengan E-government. *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)*, 1(6).
- Nuryana, A., Pawito, P., & Utari, P. (2019). Pengantar metode penelitian kepada suatu pengertian yang mendalam mengenai konsep fenomenologi. *Ensains Journal*, 2(1), 19–24.
- Paryanta, P., Sutariyani, S., & Susilowati, D. (2017). Sistem informasi administrasi kependudukan berbasis web desa Sawahan. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 3(2), 490755.
- Pilendia, D. (2020). Pemanfaatan adobe flash sebagai dasar pengembangan bahan ajar fisika: Studi literatur. *Jurnal Tunas Pendidikan*, 2(2), 1–10.
- Pratama, A., Nst, S. E., Saimara Sebayang, S. E., & Darma, D. A. (2022). Keseimbangan Governance Dan Government Dalam Dunia Digital.
- Shidiq, R. A., & Zubaedah, R. (2022). Aspek Hukum Implikasi Penyusutan Peran Notaris Terhadap Pengurusan Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(10), 178–186.